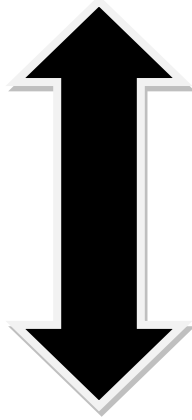




DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD)
DINAS SOSIAL**



TAHUN 2017

MASAMBA, JANUARI 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Tahun 2017 dapat terselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini sebagai salah satu bahan untuk mengetahui kinerja Dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang menguraikan berbagai kegiatan rutin dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai dalam satu tahun serta dampak terhadap pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian LPPD ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahannya akan tetapi kami berharap bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.

Kritik dan saran perbaikan sangat diharapkan dari berbagai pihak demi kemajuan di bidang sosial secara luas pada tahun-tahun mendatang, serta sebagai bahan penyempurnaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang akan datang

Atas segala upaya dari awal hingga selesainya laporan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh staf Dinas Sosial Kab. Luwu Utara atas kerja kerasnya serta berbagai pihak yang berperan serta dalam penerbitan laporan ini .

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Masamba, Januari 2018
Kepala Dinas Sosial

BESSE A. PABEANGI, S.Sos
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP : 19610816 198201 2 014

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. Dinas Sosial termasuk salah satu perangkat daerah yang termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar

Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara terbentuk pada tahun 2016 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Sebelum terbentuk Dinas Sosial tahun 2016, Dinas Sosial masih di bawah naungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin langsung oleh kepala dinas (eselon II)

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;

4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang sosial;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi;

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat/Sekertaris Dinas terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Cacat dan Pelayanan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Napza dan HIV AIDS
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Kepahlawanan Sosial, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal
- b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Perkotaan

B. Gambaran umum Dinas Sosial

1. Gambaran Umum Pegawai Dinas Sosial

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada dinas Sosial di Kabupaten Luwu Utara, diperlukan tenaga pegawai yang cukup memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Sampai akhir tahun 2017 Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara berjumlah 31 orang dan kesemuanya adalah pegawai struktural

Tabel. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara, tahun 2017.

No	Pendidikan	Jumlah (orang)		Total (orang)
		L	P	
1.	Pendidikan Formal	15	16	31
	- Pasca Sarjana (S2)	1	-	1
	- Sarjana (S1)	9	15	24
	- Diploma	-	-	-
	- SLTA / Sederajat	4	1	5
	- SLTP / Sederajat	1	-	1
	- SD / Sederajat	-	-	-

2	Pangkat / Golongan	15	16	31
	- Golongan IV c	-	1	1
	- Golongan IV b	-	-	-
	- Golongan IV a	1	-	1
	- Golongan III d	1	2	3
	- Golongan III c	1	2	3
	- Golongan III b	6	7	13
	- Golongan III a	1	1	2
	- Golongan II d	1	-	1
	- Golongan II c	1	2	3
	- Golongan II b	-	1	1
	- Golongan II a	2	-	2
	- Golongan I c	-	-	-
	- Golongan I b	-	-	-
	- Golongan I a	1	-	1

Penerimaan Pegawai Baru

Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara sepanjang tahun 2017, tidak menerima formasi baru sebagai implementasi peraturan pemerintah

Tabel. Jumlah Pegawai Baru Formasi Pengangkatan TA. 2017 Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017.

Nama	NIP	Gol/Ruang
-	-	-

Mutasi Pegawai

Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2017, memiliki pegawai mutasi baik mutasi keluar instansi maupun mutasi masuk dinas sosial. Dimana mutasi masuk dari instansi lain sebanyak 3 orang, yang terdiri dari 2 orang eselon IV dan 1 orang dari eselon III. Mutasi pegawai tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor... Tahun 2017

Tabel. Jumlah Pegawai yang melakukan mutasi dari instansi lain pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara selama Tahun 2017.

Nama / NIP	Gol/ Ruang	Keterangan
H. Ajie Saputra, S.Sos., M.Si'	IIId/Penata TK I	Muatasi Dari Setda Kab. Luwu Utara
Handri Suting, S.Kel	IIIc/Penata	Mutasi dari Dinas Perikanan
Nur Alamsyah S.Sos	IIIb/Penata Muda TK I	Mutasi Dari Dinas Pendapatan Daerah

Sedangkan pegawai yang dimutasi keluar dari dinas Sosial ke instansi lain tidak ada.

Tabel. Jumlah Pegawai yang melakukan mutasi ke instansi lain pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara selama Tahun 2017.

Nama / NIP	Gol/ Ruang	Keterangan
Amiruddin, S.Sos	IIId/Penata TK I	Mutasi ke Kantor Camat Baebunta

Kenaikan Pangkat

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara yang mengalami kenaikan pangkat/ golongan selama tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel . Nama dan Jumlah Pegawai yang Naik Pangkat di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017.

Nama	Pangkat Lama	Pangkat baru	TMT
Besse A. Pabeangi, S.Sos	IVb	IVc	01 Oktober 2017
Paisal Ansyar, SE	IIId	Iva	01 Oktober 2017
Halik, S.AN	IIla	IIlb	01 April 2017
Nursanti, S.AN	IIla	IIlb	01 April 2017
Sri Hartati, S.AN	IIla	IIlb	01 April 2017
Ahmad Yani, S.AN	IIla	IIlb	01 April 2017
Salmawati Kujje, SE	IIla	IIlb	01 April 2017

Diklat Kepemimpinan

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, selain itu Dinas Sosial juga memiliki pejabat struktural dimana sebelum menjabat posisi tersebut salah satu syarat yang harus dimiliki adalah selesainya mengikuti diklat kepemimpinan. Nama pejabat struktural dinas Sosial yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat kepemimpinan Dinas Sosial
Kab. Luwu Utara TA. 2017

No	Diklat Kepemimpinan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Latpim II (Spamen)	-	1	1
2	Latpim III (Spama)	1	-	1
3	Latpim IV (Adum)	-	1	1
Jumlah		1	2	3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan sepanjang tahun anggaran 2017 adalah sebanyak 3 orang sehingga sampai akhir tahun anggaran 2017 jumlah pegawai negeri sipil pada Dinas Sosial yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 5 orang dengan sebaran sebagai berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat kepemimpinan Dinas Sosial
sampai tahun 2017

No	Diklat Kepemimpinan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Latpim II (Spamen)	-	1	1
2	Latpim III (Spama)	2	-	2
3	Latpim IV (Adum)	1	2	3
Jumlah		3	3	6

2. Potensi unggulan internal dan eksternal

Untuk memperlancar kegiatan Dinas maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung, selain sarana dan prasarana pendukung, dalam menjalankan tugas kegiatan Dinas Sosial juga di bantu oleh tenaga pendamping baik tenaga pendamping program pusat maupun tenaga pendamping program provinsi dan kabupaten (TKSK). Tenaga pendamping yang dimaksud ada dua yaitu tenaga pendamping PKH dengan jumlah 52 orang sedangkan tenaga pendamping TKSK sebanyak 12 orang.

Tabel : tenaga pendamping Dinas Sosial

No	Tenaga Pendamping	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pendamping PKH	30	20	50
2	Pendamping TKSK	12	-	12
3	Pendamping TKS	1	-	1
Jumlah		43	20	63

Selain tenaga pendamping yang dimiliki Dinas Sosial juga memiliki aset sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara. Tabel aset tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : Aset Dinas Sosial tahun 2017

NO	JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KEADAAN	JUMLAH	KET
			BARANG (B/KB/RB)		
1	2	3	4	5	6
1	Makam Pahlawan	1996	Baik	1	
2	Tanah Untuk Monumen	1980	Baik	1	
3	Tanah Untuk Monumen	1987	Baik	1	
4	Tanah Untuk Monumen	1987	Baik	1	
5	Staion Wagon	2011	Baik	1	
6	Sepeda Motor	1985	Rusak Bera	1	
7	Sepeda Motor	1985	Rusak Bera	1	
8	Sepeda Motor	1985	Rusak Bera	1	
9	Sepeda Motor	1985	Rusak Bera	1	
10	Sepeda Motor	1996	Rusak Bera	1	
11	Sepeda Motor	1999	Rusak Bera	2	
12	Sepeda Motor	2002	Rusak Bera	1	
13	Sepeda Motor	2003	Rusak Bera	1	
14	Sepeda Motor	2003	Rusak Bera	1	
15	Sepeda Motor	2003	Rusak Bera	1	
16	Sepeda Motor	2006	Rusak Bera	1	
17	Sepeda Motor	2012	Baik	1	
18	Sepeda Motor	2012	Baik	1	
19	Sepeda Motor	2015	Baik	1	
20	Sepeda Motor	2017	Baik	26	
21	Global Positioning System	2010	Baik	1	
22	Scanner	2001	Baik	1	
23	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2003	Baik	1	
24	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	2013	Baik	2	
25	Mesin Ketik Listrik Portable	2015	Baik	2	
26	Mesin Ketik Lain-lain	2004	Baik	1	
27	Mesin Calculator	2001	Rusak Bera	1	
28	Filling Besi/Metal	2017	Baik	1	
29	Lemari kayu	2001	Rusak Bera	1	
30	Lemari kayu	2001	Rusak Bera	1	
31	Lemari kayu	2005	Baik	1	
32	Lemari kayu	2015	Baik	3	
33	Lemari kayu	2015	Baik	1	

NO	JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KEADAAN	JUMLAH	KET
			BARANG (B/KB/RB)		
34	Lemari kayu	2017	Baik	1	
35	Papan Pengumuman	2005	Baik	1	
36	Mesin Absensi	2017	Baik	1	
37	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2008	Baik	1	
38	Lemari Kayu	2006	Baik	36	
39	Meja Kayu/Rotan	2001	Rusak Bera	1	
40	Meja Kayu/Rotan	2017	Baik	1	
41	Kursi Rapat	2005	Baik	4	
42	Kursi Rapat	2006	Baik	110	
43	Kursi Rapat	2017	Baik	10	
44	Kursi Tamu	2001	Baik	1	
45	Kursi Tamu	2006	Baik	1	
46	Kursi Putar	2005	Baik	1	
47	Kursi Putar	2006	Baik	4	
48	Kursi Putar	2006	Baik	1	
49	Kursi Putar	2010	Baik	12	
50	Kursi Putar	2010	Baik	1	
51	Kursi Putar	2017	Baik	5	
52	Kursi Putar	2017	Baik	1	
53	Kursi Lipat	2003	Baik	4	
54	Meja 1/2 Biro	2001	Baik	2	
55	Meja 1/2 Biro	2001	Baik	1	
56	Meja 1/2 Biro	2002	Baik	2	
57	Meja 1/2 Biro	2003	Baik	4	
58	Meja 1/2 Biro	2003	Baik	1	
59	Meja 1/2 Biro	2003	Baik	1	
60	Meja 1/2 Biro	2005	Baik	4	
61	Meja 1/2 Biro	2006	Baik	12	
62	Meja 1/2 Biro	2009	Baik	4	
63	Meja 1/2 Biro	2017	Baik	4	
64	Kursi Plastik	2017	Baik	10	
65	Jam Mekanis	2006	Baik	3	
66	AC Unit	2004	Baik	1	
67	AC Unit	2014	Baik	1	
68	AC Unit	2017	Baik	1	
69	AC Split	2003	Baik	1	

NO	JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KEADAAN	JUMLAH	KET
			BARANG (B/KB/RB)		
70	AC Split	2005	Baik	1	
71	AC Split	2005	Baik	1	
72	AC Split	2010	Baik	2	
73	AC Split	2013	Baik	6	
74	AC Split	2017	Baik	2	
75	Wireless	2006	Baik	1	
76	Dispenser	2008	Baik	1	
77	P.C Unit	2012	Baik	1	
78	P.C Unit	2012	Baik	1	
79	P.C Unit	2015	Baik	1	
80	P.C Unit	2017	Baik	4	
81	Lap Top	2015	Baik	13	
82	Lap Top	2016	Baik	1	
83	Lap Top	2016	Baik	1	
84	Lap Top	2016	Baik	1	
85	Lap Top	2017	Baik	6	
86	Note Book	2009	Baik	1	
87	Note Book	2013	Baik	2	
88	Note Book	2014	Baik	28	
89	PC Tablet	2014	Baik	1	
90	Printer	2009	Rusak Berat	3	
91	Printer	2010	Rusak Berat	2	
92	Printer	2012	Rusak Berat	1	
93	Printer	2012	Rusak Berat	1	
94	Printer	2012	Baik	1	
95	Printer	2014	Baik	2	
96	Printer	2014	Baik	1	
97	Printer	2014	Baik	1	
98	Printer	2015	Baik	2	
99	Printer	2017	Baik	4	
100	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2001	Baik	1	
101	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2006	Baik	6	
102	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2001	Baik	1	
103	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2001	Baik	1	
104	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2009	Baik	3	
105	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2010	Baik	2	
106	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2010	Baik	1	
107	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2002	Baik	2	

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial, Maka untuk melaksanakan tugas fungsinya tersebut kemudian di jabarkan dalam visi dan misi Dinas Sosial yang akan dilaksanakan dalam lima tahun

A. VISI DAN MISI

A.1. VISI

Untuk menjabarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yaitu “Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sektor sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara menetapkan visi sebagai berikut

“ Terwujudnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Luwu Utara

Penjelasan atas visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

Kesejahteraan Sosial adalah hal atau keadaan aman, keselamatan dan ketentraman.

A.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Kabupaten LUwu Utara 2016 - 2021 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara

Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara menetapkan Misi 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Mewujudkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial
4. Mewujudkan kualitas pemukiman masyarakat miskin

A.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH SKPD

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupetn Luwu Utara tersebut, maka dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis. Tujuan tersebut akan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Sosial yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu sampai lima tahun kedepan yang akan menggambarkan strategi organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah program dan aktifitas organisasi pada pencapaian misi yang diterjemahkan dalam sasaran. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah di capai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu **“Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”** maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Sasaran : Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Untuk mewujudkan misi kedua **“Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial”** maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan

adalah :

Tujuan : Membangun kesetiakawanan sosial dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial

Sasaran : Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi Ketiga “**Mewujudkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial**” maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Sasaran : Pengembangan SDM dan pemberdayaan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4.1.4. Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ke Empat

Dalam mewujudkan Misi Keempat “**Mewujudkan kualitas pemukiman masyarakat miskin**” maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

Tujuan : Mewujudkan pemukiman masyarakat miskin

Sasaran : Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat miskin

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara , selain dirancang untuk merespon isu strategis, optimalisasi fungsi dan peran Dinas Sosial, peningkatan kualitas manajemen pelayanan Sosial dan kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial, juga dirancang dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Luwu Utara .

Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan di bidang sosial pada 2016 - 2021.

Adapun Strategi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

1. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan misi kesatu “Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel IV.3 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Membangun perekonomian masyarakat melalui pengutan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi	Peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui penguatan pendampingan, peningkatan kelompok serta peningkatan mutu layanan jaminan bagi masyarakat miskin

2. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan misi kedua “Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel IV.4 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Membangun kesetiakawanan sosial dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial	Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Membangun rasa kesetiakawanan sosial, memupuk rasa gotong royong dan persaudaraan	Penanganan konflik sosial dan konflik beragama serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak peningkatan kesiap siagaan dan penanggulangan bencana alam
	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial	Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Penanganan peninggalan pahlawan sejarah kebangsaan

3. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan misi kesatu “Mewujudkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel IV.3 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pengembangan SDM dan pemberdayaan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Membangun peran lembaga kesejahteraan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penguatan kelembagaan pemberdayaan sosial dan potensi kesejahteraan sosial
	Meningkatnya jumlah aparatur Dinas Sosial yang berkualitas dan berkinerja tinggi	Mendorong peningkatan kapasitas aparatur Dinas sosial	Penatausahaan administrasi perkantoran, peningkatan kinerja aparatur dan pelatihan dan pendidikan aparatur

4. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan misi kesatu “Mewujudkan kualitas pemukiman masyarakat miskin” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel IV.4 Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemukiman masyarakat miskin	Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat miskin	Peningkatan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kualitas pemukiman	Penyediaan bahan bangunan buat msyarakat miskin dan korban bencana

B. KEGIATAN PRIORITAS SKPD

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial selama lima tahun maka di susunlah program kegiatan, dimana Program itu sendiri merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka indikasi kegiatannya Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara yang akan dilaksanakan setiap tahun selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 mencakup 12 (dua belas) Program dan 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbe Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
9. Penatausahaan Keuangan Administrasi Kepegawaian dan Ketatausahaan dan Asset

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
4. Pengadaan Meubelair
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional;

7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
 9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan kegiatan
 1. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi
 4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan indikator kegiatan
 1. Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan
 5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian**, dengan kegiatan
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 6. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan:
 1. Sinkronisasi Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
 7. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan**, dengan kegiatan :
 1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas /Unit Kerja Terkait
 8. **Program Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**, dengan indikator kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin
3. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
5. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

9. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

1. Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia
2. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum Bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak.
3. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
6. Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa (Penyediaan Bahan Bantuan Korban Bencana Alam, Sosial dan PMKS Lainnya).
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
8. Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS

9. Rekonsiliasi, Rehabilitasi, Rekonstruksi Sosial Dalam Penanganan Konflik Sosial

10. Program Pembinaan Anak Terlantar , dengan kegiatan :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar
2. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
3. Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar
4. Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar
5. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

11. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma , dengan kegiatan

1. Pendataan Penyandang cacat dan Penyakit Kejiwaan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
3. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
4. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
5. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik

12. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, dengan kegiatan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Asuhan/Jompo
3. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
4. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo
5. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik Panti Asuhan/Jompo
6. Pembinaan dan Pemberdayaan Panti Asuhan / LKSA

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

13. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks, Narapidana, PKS, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya, dengan kegiatan

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
2. Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial
3. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

14. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan:

1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha
2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
3. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

I.5. Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 antara lain :

1. Sosialisasi kepada kelompok sasaran sebelum pelaksanaan kegiatan lebih diintensifkan.
2. Perlu perbaikan/peningkatan SDM petugas teknis
3. Perlu perbaikan/peningkatan SDM pelaksana kegiatan maupun panitia pengadaan.

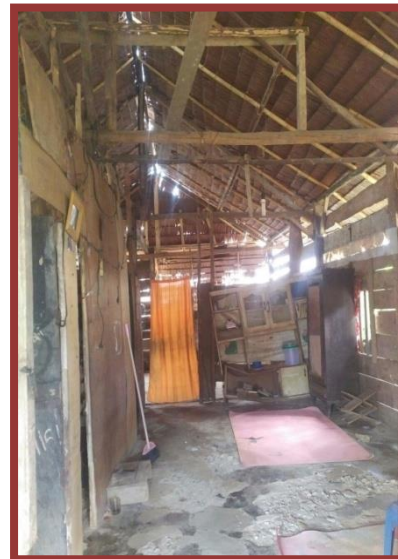
4. Koordinasi di berbagai lini terhadap semua pihak yang terkait perlu ditingkatkan.
5. Perlu penambahan sarana mobilisasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi di lapangan.
6. Penambahan sarana dan perbaikan prasarana fisik.
7. Perlunya perbaikan tingkat kesejahteraan aparat pelaksana kegiatan.

Adapun solusi dalam menyikapi berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan ini diajukan solusi sebagai berikut :

1. Setiap pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik perlu dialokasikan anggaran sosialisasi.
2. Jumlah petugas teknis lapang dan PPL perlu ditambah dan dilatih secara intensif.
3. Jalur koordinasi secara vertikal maupun horisontal perlu disederhanakan.
4. Pengadaan kendaraan operasional petugas lapang
5. Perbaikan prasarana fisik untuk memudahkan mobilisasi.
6. Peningkatan honor, insentif atau pendapatan lain-lain yang sah untuk meningkatkan kinerja pelaksana kegiatan.

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI



BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI

Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan rencana program kerja Dinas Sosial tahun 2017 yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Dinas Sosial yang dijabarkan dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2017, Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2017 yang mengacu pada dokumen pelaksanaan (DPA) pokok 2017 yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara sejumlah Rp. 8.754.366.000,- (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 6.274.500.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.479.866.000 (Dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada anggaran perubahan jumlah anggaran yang dikelola mengalami penurunan sebesar Rp 886.736.000,- (Delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga dana yang dikelola pada anggaran perubahan 2017 sebesar Rp 7.867.630.000,- (Tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Operasional sebesar Rp. 7.270.918.000,- (Tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 596.712.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Dimana belanja Operasional terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terbagi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Pengurangan anggaran itu terjadi pada kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat dimana pada keluaran kegiatan ini adalah pemenuhan jasa bagi pemuka agama (TPA) dan berdasarkan petunjuk dari tim anggaran bahwasanya hibah langsung berupa pemberian jasa tunai merupakan tupoksi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan untuk belanja pendapatan, Dinas Sosial kabupaten Luwu Utara tidak mengelolah dana pendapatan.

Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja

Dinas Sosial merupakan salah satu dinas yang mengelolah urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, dengan anggaran sebesar Rp. 7.867.630.000,- (Tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasional dalam Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 7.270.918.000,- dimana yang terealisasi sebesar Rp. 7.252.460.665,- atau 99,75%, yang dialokasikan pada Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.175.730.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.365.188.000,- Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 596.712.000,-. Alokasi dan realisasi Belanja dapat dilihat pada tabel di bawaah ini.

Tabel. Total Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasional	7.270.918.000,-	7.252.460.665,-	99,75%
2.	Belanja Modal	596.712.000,-	594.582.000,-	99.64%
Jumlah Belanja		7.867.630.000,-	7.847.042.665	99,74%

Tabel. Belanja Operasional

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	2.175.730.000,-	2.171.578.363,-	99,81%
2.	Bel. Barang & Jasa	5.095.188.000,-	5.080.882.302,-	99,72%
Jumlah Belanja		7.270.918.000,-	7.252.460.665,-	99,75%

Tabel Belanja Modal

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	596.712.000	594.582.000	99,64%
2.	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0%
3.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0%
Jumlah Belanja Modal		596.712.000,-	594.582.000	99,64%

Alokasi dana untuk tiap Program dan Kegiatan pada alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Luwu Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	827.514.200	158.680.000	668.834.200	-
Penyediaan jasa surat menyurat	100.000	-	100.000	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2.500.000	-	2.500.000	-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	1.000.000	-	1.000.000	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.000.000	-	36.000.000	-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	-	5.000.000	-
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000	-	7.500.000	-
Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	-	30.000.000	-
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	265.000.000	-	265.000.000	-
Penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan asset	480.414.200	158.680.000	480.414.200	-

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	684.712.000	-	98.000.000	586.712.000
Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	445.822.000	-	-	445.822.000
Pengadaan perlengkapan kantor	140.890.000	-	-	140.890.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	33.500.000	-	33.500.000	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49.500.000	-	49.500.000	-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	5.000.000	-	5.000.000	-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	10.000.000	-	10.000.000	-

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000	-	-	10.000.000
Pengadaan mesin/kartu absensi	10.000.000	-	-	10.000.000

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.500.000	19.000.000	2.500.000	-
Penyusunan laporan caaian kinerja dan ikhtisar realisasi keinerja SKPD	21.500.000	19.000.000	2.500.000	-

V. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	63.062.000	-	63.062.000	-
Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/Unit kerja terkait	63.062.000	-	63.062.000	-

VI. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	210.200.000	11.850.000	198.350.000	-
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	71.000.000	11.850.000	59.150.000	-
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	139.200.000	-	139.200.000	-

VII. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.306.656.850	7.800.000	2.298.856.850	-
Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	57.434.950	2.700.000	54.734.950	-
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.013.496.900	-	1.013.496.900	-
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	888.475.000	-	888.475.000	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	347.250.000	5.100.000	342.150.000	-

VIII. Program Pembinaan Anak Terlantar

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Pembinaan Anak Terlantar	193.081.950	2.700.000	190.381.950	-
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar	51.128.950	2.700.000	48.428.950	-
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	141.953.000	-	141.953.000	-

IX. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan	187.116.200	19.300.000	167.816.200	-

Trauma				
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat	106.561.200	19.300.000	87.261.200	-
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	80.555.000	-	80.555.000	-

X. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	63.488.000	2.700.000	60.788.000	-
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	63.488.000	2.700.000	60.788.000	-

XI. Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	74.903.000	20.600.000	54.303.000	-
Pemberdayaan Eks Penyakit Sosial	74.903.000	20.600.000	54.303.000	-

XII. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.049.665.800	5.050.000	1.044.615.800	-
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1.049.665.800	5.050.000	1.044.615.800	-

Tingkat Pencapaian Program/Output

Secara keseluruhan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun Anggaran 2017, indikator kegiatan yang ditargetkan dari tiap kegiatan seluruhnya berhasil dicapai selama masa pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel. Capaian kinerja kegiatan program administrasi perkantoran

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persen Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian laporan pelayanan administrasi perkantoran			
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	1650 Surat	11453 Surat	694%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telp yang terbayar	2 Rekening	2 Rekening	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa servis dan pungutan pajak	3 kendaraan	3 Kendaraan	100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan	2 Orang	2 Orang	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronika yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang diadakan	5 Jenis	5 Jenis	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	2 Keg	2 Keg	100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi	56 ASN	31 ASN	55,36%
Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	2 Dok	2 Dok	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian sarana dan prasarana umum perkantoran			
Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	26 Unit	26 Unit	100%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	53 Unit	53 Unit	100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah lokasi gedung kantor yang dipelihara	1 Kantor	1 Kantor	100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	100%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Jenis	20 Jenis	100%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	20 Jenis	20 Jenis	100%
Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan	1 Unit	1 Unit	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja			
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dok	2 Dok	100%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Peningkatan layanan kedinasan			
Kunjungan Kerja Bersama bupati/ Wakil Bupati / DPRD/ Muspida /Pejabat pemerintah tingkat atas /unit kerja terkait	Jumlah kunjungan pendampingan kedinasan	10 Kunjungan	10 Kunjungan	100%

Tabel. Capaian kinerja kegiatan program prioritas Dinas Sosial tahun 2017

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persen Capaian
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pendampingan			
Fasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga miskin	Jumlah pembinaan usaha bagi keluarga miskin	5 Kube	5 Kube	100%
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan	5 Kube	5 Kube	100%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dari 26 PMKS			
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Jumlah orang diberi perlindungan hukum	18 Kasus	18 Kasus	100%
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penyaluran bantuan bagi PMKS	3 UEP	3 UEP	100%
	Jumlah pendamping dan operator yang menerima jasa	41 orang	41 Orang	100%
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah bahan bangunan rumah untuk korban bencana alam, sosial dan PMKS lainnya	15 KK	22 KK	147%
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	Jumlah dokumen PMKS dan PSKS	1 dok	1 dok	100%
Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang tertangani			
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dilatih	10 Orang	10 Orang	100%
Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan	5 Kube	5 Kube	100%
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah penyandang cacat yang tertangani			
Pembangunan sarana dan prasarana perawat an para penyandang cacat dan trauma	Jumlah pelayanan UPSK bagi penyandang cacat	75 Orang	85 Orang	113%
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat yang mendapat bantuan	22 ODK	22 ODK	100%
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase LKSA yang tertangani			
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah panti yang mendapat bantuan	9 LKSA	7 LKSA	77,78%
Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah penyandang penyakit sosial yang tertangani			
Pemberdayaan Eks penyakit sosial	Jumlah masyarakat yang menerima pengetahuan tentang penyakit sosial	345 orang	425 Orang	123,19%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kompetensi kelembagaan dan potensi sumber kesejahteraan sosial			
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah pemuka agama yang mendapat insentif pemerintah	521 Orang	521 Orang	100%
	Jumlah lokasi karang taruna yang dibina	9 Kec	9 Kec	100%

Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 antara lain :

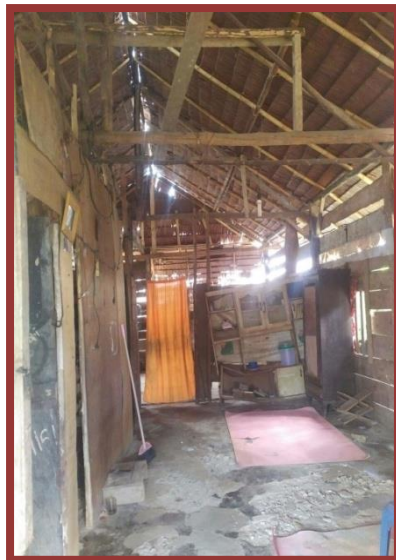
1. Sosialisasi kepada kelompok sasaran sebelum pelaksanaan kegiatan lebih diintensifkan.
2. Perlu perbaikan/peningkatan SDM petugas teknis dan pendamping
3. Koordinasi di berbagai lini terhadap semua pihak yang terkait perlu ditingkatkan.
4. Perlu penambahan sarana mobilisasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi di lapangan.
5. Perlunya perbaikan tingkat kesejahteraan aparat pelaksana kegiatan.
6. Klasifikasi PMKS belum maksimal
7. Kompleksitas PMKS sangat tinggi

Adapun solusi dalam menyikapi berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan ini diajukan solusi sebagai berikut :

1. Setiap pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik perlu dialokasikan anggaran sosialisasi.
2. Jumlah petugas teknis lapang (Pendamping) perlu ditambah dan dilatih secara intensif.
3. Jalur koordinasi secara vertikal maupun horisontal perlu disederhanakan.
4. Pengadaan kendaraan operasional petugas lapang
5. Perbaikan prasarana fisik untuk memudahkan mobilisasi.
6. Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan klasifikasi PMKS

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN



BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN



IV.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

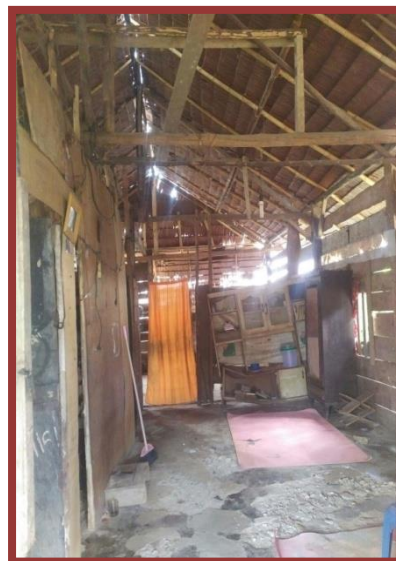
Pada tahun anggaran 2017 Dinas Sosial Kabupaten Luwu utara tidak lagi mengelolah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Sosial. Semua tugas pembantuan telah di alihkan ke satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi melaui dana dekonsentrasi

II.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Sama halnya dengan tugas pembantuan yang diterima, Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara pada tahun anggaran 2017 juga tidak melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada istansi lain dan stkeholder lainnya

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

V.1. Kerjasama Daerah/SKPD Dengan Pihak Ketiga (Daerah Lain/NGO/Lembaga Pemerintahan/Swasta Lainnya)

V.1.1. Mitra yang diajak kerjasama

-

V.1.2. Dasar Hukum

-

V.1.3. Bidang Kerjasama

-

V.1.4. Nama Kegiatan

-

V.1.5. SKPD Penyelenggaran Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

-

V.1.6. Sumber dan Jumlah Anggaran

-

V.1.7. Jangka Waktu Kerjasama

-

V.1.8. Hasil (Output) Dari Kerjasama

-

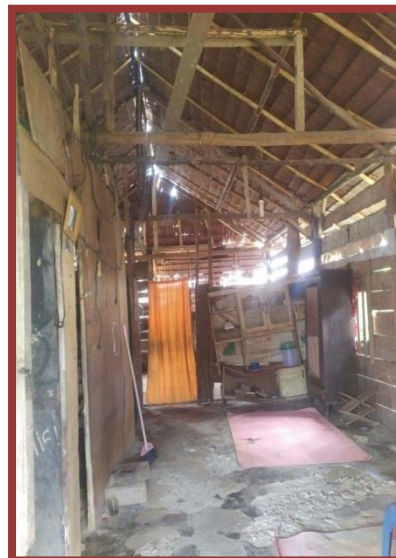
V.1.9. Permasalahan dan Solusi

-

V.1.10. Hal-Hal Lain Yang dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB VI

PENUTUP



BAB VI PENUTUP

Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara TA. 2017

a. Jumlah Anggaran DPA

Jumlah anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2017 (anggaran pokok) sejumlah Rp. 8.772.966.999,- dan pada dokumen anggaran perubahan menjadi Rp. 7.867.630.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.847.042.665,- atau terealisasi sebesar 99,74%, yang terdiri atas kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal.

b. Jumlah Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 596.712.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 594.582.000 atau 99,64%

c. Total Belanja operasional

Belanja barang dan belanja pegawai di anggarkan sebesar Rp. 7.270.918.000 dimana terealisasi sebesar 7.252.460.665,- atau sebesar 99,75%

d. Indikator setiap kegiatan dapat tercapai 100% dan semua kegiatan yang direncanakan terlaksana dengan baik

Masamba, Januari 2018
KEPALA DINAS

BESSE A. PABEANGI, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610816 198201 2 014

Lampiran

- a. Daftar Keputusan Pimpinan SKPD dalam tahun 2017
- b. Copy Laporan Keuangan/LRA/CaLK/Neraca SKPD 2017 sebelum/sesudah audit BPK
- c. Copy Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil Lingkup SKPD yang bersangkutan per 30 Desember 2017
- d. Copy Dokumen Renja SKPD 2017
- e. Copy Daftar Opname Barang/Inventaris Barang SKPD yang memuat kondisi masing-masing barang/aset (RB/RR/B)
- f. Daftar penghargaan (piala/piagam/rekomendasi/penghargaan tertulis lainnya) yang diterima SKPD baik institusional maupun non institusional (perorangan/kelompok masyarakat) yang terkait dengan kinerja dan bidang tugas SKPD tahun 2017

